RENJA
DPMPTSP
KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2025

DPMPTSP KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara
Kab. Minahasa – Prov. Sulawesi Utara
95614

www.dpmptsp.minahasa.go.id
dpmptsp.minahasa@gmail.com
Dpmptsp Kabupaten Minahasa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat bimbingan dan perlindungan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen rancangan akhir renja yang telah dievaluasi dan diverifikasi untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memuat antara lain pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan tingkat capaian renstra serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta mereview terhadap rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran berdasarkan pada pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan, program dan kegiatan, dan penutup.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun dan biarlah kiranya boleh memberikan informasi, manfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang bagi pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat pada umumnya, masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan sistem dan kinerja lembaga ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Minahasa.

Tondano, 23 Oktober 2024
Kepala Dinas,

Mekry J. Sondey,SE, M.Si
Pembina Utama Muda
19660506 199003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 42
2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 42
2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional 50
2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 52
2.3.4. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 54
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 56
2.4.1. Perbandingan antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 57
2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 60
2.4.3 Temuan yang diperoleh dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 76
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 76

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 80
3.2.1. Tujuan 80
3.2.2. Sasaran 81
3.3 Program dan Kegiatan 82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 88
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 88
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 90
4.2.1. Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 94
4.3 Penjelasan Ketidaksesuaian 108
BAB V PENUTUP 120
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 120
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 121
5.3 Rencana tindak lanjut 122

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, terarah, terpadu, berkelanjutan sesuai dengan level daerah.

Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki jangka waktu 20 tahun dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lima tahunan. RPJMD lebih lanjut dijabarkan pada dokumen perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, Renja perangkat daerah tersebut mengacu kepada RKPD. Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RPJMD kepala daerah terpilih, maka penyusunan renja mengacu pada renja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) ialah penyempurnaan dari Rancangan Awal dan Rancangan Rencana Kerja menjadi Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perda tentang RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Prinsip penyusunan Renja adalah dengan menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2024-2026 baik dari segi pendanaan yang diusulkan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian, target keluaran, total dana kegiatan yang diperlukan.

Berikut adalah diagram alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah :

Diagram alur hubungan antar dokumen perencanaan daerah

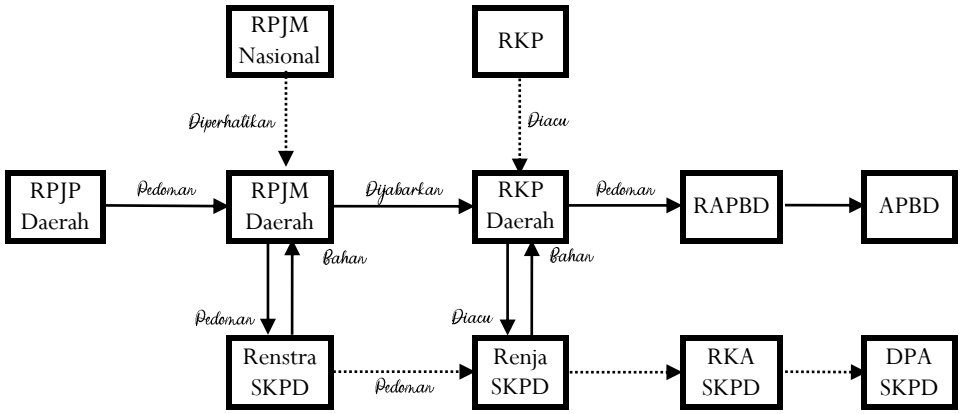

Berdasarkan diagram alur diatas, seluruh dokumen merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu serta harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Perangkat daerah wajib menyusun Renstra setiap lima tahun sekali dan Renja setiap tahun yang merupakan penjabarannya.

Diagram alur penyusunan Renja

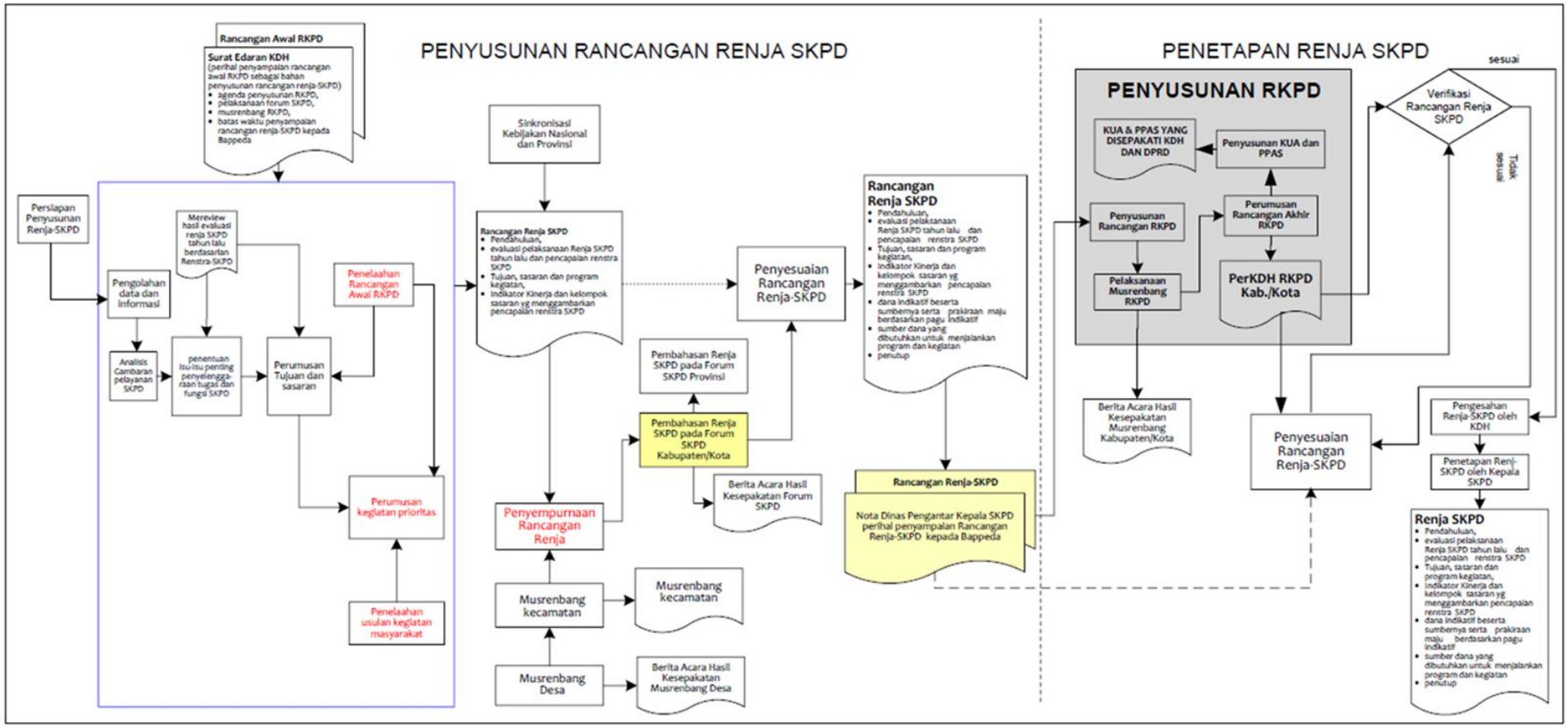

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;
35. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah untuk menjadikan bahan acuan tentang tujuan dan sasaran tahunan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, dan bahan evaluasi dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun 2024.

Tujuannya untuk mensinergikan dan memberi masukan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Anggaran 2025, tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa selama 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II Hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra PD
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan sasaran PD
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran renja PD
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan PD

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Minahasa setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdarkan hasil evaluasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Minahasa ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan realisasi keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, 12 (duabelas) sub kegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan sumber DAK, realisasinya mencapai 92,34% atau sebesar Rp. 3.167.448.102,- *(tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus dua*

rupiah) dari total anggaran Rp. 3.430.109.230,- *(tiga milyar empat ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)*.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, 12 (duabelas) sub kegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan sumber DAK, realisasinya mencapai 93,34% atau sebesar Rp. 3.104.193.004,- *(tiga milyar seratus empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah)* dari total anggaran Rp. 3.325.675.032,- *(tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah)*, dengan rekapitulasi realisasi anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan sumber DAK, pada TW II realisasinya mencapai 46,28% atau sebesar Rp. 1.451.977.379,- *(satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)* dari total anggaran Rp. 3.137.099.877,- *(tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*.

Tabel 2.1 Tabel rekapitulasi realisasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Uraian	Anggaran (Rp.)			Realisasi (Rp.)			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	TW II 2024	2022	2023	TW II 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Belanja operasi	3.424.871.230	3.316.130.032	3.122.300.877	3.170.072.698	3.094.653.004	1.451.977.379	92,56	93,32	46,28
Belanja modal	5.238.000	9.545.000	14.799.000	5.100.000	9.540.000	-	97,37	99,95	-
Total	3.430.109.230	3.325.675.032	3.137.099.877	3.175.172.698	3.104.193.004	1.451.977.379	92,57	93,34	46,28

Tabel 2.2 Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023

No.	Uraian program / kegiatan/ sub kegiatan	Alokasi anggaran (rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Program promosi penanaman modal	-	96.977.940	-	90.019.360	-	92,82
	1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	-	96.977.940	-	90.019.360	-	92,82
	1 Pelaksanaan kegiatan promosi	-	96.977.940	-	90.019.360	-	92,82

No.	Uraian program / kegiatan/ sub kegiatan	Alokasi anggaran (rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota						
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	360.215.805	552.949.925	353.831.173	447.664.267	98,23	80,96
	2 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	360.215.805	552.949.925	353.831.173	447.664.267	98,23	80,96
	2 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	82.665.345	94.125.000	82.425.000	82.425.000	99,71	87,57
	3 Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	213.571.710	221.070.475	207.506.173	213.884.817	97,16	96,75
	4 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	63.978.750	237.754.450	63.900.000	151.354.450	99,88	63,66
3	Program pelayanan penanaman modal	93.600.000	93.600.000	91.217.720	93.600.000	97,45	100,00
	3 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	93.600.000	93.600.000	91.217.720	93.600.000	97,45	100,00
	5 Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem	-	93.600.000	-	93.600.000	-	100,00
4	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	15.980.000	5.780.000	15.980.000	5.780.000	100,00	100,00
	4 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	15.980.000	5.780.000	15.980.000	5.780.000	100,00	100,00
	6 Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	15.980.000	5.780.000	15.980.000	5.780.000	100,00	100,00
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	2.960.313.425	2.576.367.167	2.706.419.209	2.467.129.377	91,42	95,76
	5 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah anggaran	-	799.200	-	799.200	-	100,00
	7 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	799.200	-	799.200	-	100,00
	6 Administrasi keuangan perangkat daerah	2.544.003.500	2.252.858.707	2.302.327.820	2.146.229.706	90,50	95,27
	8 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.544.003.500	2.252.858.707	2.302.327.820	2.146.229.706	90,50	95,27
	7 Administrasi umum perangkat daerah	116.170.925	67.507.700	111.083.957	67.302.271	95,62	99,70
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36.821.460	10.923.700	36.725.780	10.908.800	99,74	99,86
	10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.999.790	4.000.000	2.887.290	4.000.000	41,25	100,00
	11 Penyelenggaraan rapat	68.509.675	52.584.000	67.630.887	2.393.471	98,72	99,64

No.	Uraian program / kegiatan/ sub kegiatan	Alokasi anggaran (rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	koordinasi dan konsultasi SKPD						
	8 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.238.000	9.545.000	5.100.000	9.540.000	97,37	99,95
	12 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5.238.000	9.545.000	5.100.000	9.540.000	97,37	99,95
	9 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	260.971.000	211.726.560	254.847.582	209.329.200	97,65	98,87
	13 Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	-	4.500.000	-	100,00	-
	14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.271.000	28.126.560	15.147.582	25.729.200	71,21	91,48
	15 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	235.200.000	183.600.000	235.200.000	183.600.000	100,00	100,00
	10 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33.930.000	33.930.000	33.059.850	33.929.000	97,44	100,00
	16 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.930.000	33.930.000	33.059.850	33.929.000	97,44	100,00
	Jumlah	3.430.109.230	3.325.675.032	3.167.448.102	3.104.193.004	92,34	93,34

Tabel 2.3 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	
2	Peningkatan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,11	Rp. 201.147.433.804	287 (70 M)
		Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA	20	2.647	13.235
		Daya serap tenaga kerja dalam investasi (PMDN/PMA)	500 Orang	11.604 Orang	2.320,80
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase IKM terhadap layanan publik	87	87	100

Tabel 2.4 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) s/d Tahun 2022 Kabupaten Minahasa (T-C.29.)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Urusan Pemerintahan									
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal									
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6 %	(273,73) %	11,11 %	6.139.449.056.111	582,16	25 %	201.147.433.804	287
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	3 Dokumen	%	25 %	Dokumen	0	25 %	Dokumen	0
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18 Dokumen	Kegiatan Usaha	Kegiatan	Kegiatan	0	Kegiatan	Kegiatan	0
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	Dokumen	0	9 Dokumen	Dokumen	0
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	Dokumen	0
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	3 Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0	Dokumen	Dokumen	0
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	9 Dokumen	Dokumen	0	9 Dok	Dokumen	0
2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	30 Badan Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	30 Badan Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Tercapainya Jumlah kemitraan usaha nasional	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat	30 UMKM	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar								
2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66 Investor	22 Investor	17 %	0	0	10 %	0	0
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	180 Pengunjung	Pengunjung	3 Kegiatan	Kegiatan	0	1 Kegiatan	3 Kegiatan	33,33
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0	Dokumen	613944Dokumen	Dokumen
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	240.000.000.000	638.920.342.000	900.000.000.000	6.139.449.056.111	582,16	70.000.000.000	201.147.433.804	2908,13
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9 Laporan	82 Izin/ Non Izin Izin	85 Izin/ Non Izin	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual		85 Izin/ Non Izin	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	25 Investor	Pelaku usaha	-	-	-	-	-	-
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	Dokumen	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja	100	1000 pelaku usaha	2.647 pelaku usaha	
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	Kegiatan	-	1.802 Investor 9 non UMK 1.793 UMK	-	-	2.647 Investor 5 non UMK 2.642 UMK	-
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko Lintas Daerah Kab/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	360 Kegiatan Usaha	Kegiatan usaha	-	-	-	-	-	-
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	37 Laporan	27 %	17 %	353.831.173	98,23	10 %	10 %	-
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	9 Laporan	22 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	26 Kali	12 Kali	-
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 Kegiatan Usaha	48 Orang/Hari x 12 Kali	15 Kegiatan	16 Kegiatan	100	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	-
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	615 Pelaku Usaha	78 Orang/Hari x 21 Kali	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	-
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan	39 Kegiatan Usaha	48 Orang/Hari x 24 Kali	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
		Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	3 Dokumen	25 %	25 %	25 %	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	3 Laporan	Sistem	3 Sistem	1 Sistem	33,33	1 Sistem	1 Sistem	-
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	44 Dokumen	Dokumen	3 Sistem	1 Sistem	33,33	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	A		A	BB		A	C	
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	88	81	89		87	87	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	40 Dokumen	95 %	97 %	97 %	100	100 %	100 %	-
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	-
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Dokumen	-	-	-	Dokumen	Dokumen	-
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Dokumen	-	-	-	Dokumen	Dokumen	-
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	Dokumen	-	-	-	Dokumen	Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
		Dokumen DPA-SKPD								
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Dokumen	-	-	-	Dokumen	Dokumen	-
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 ASN	17 Orang/bulan	25 ASN	23 ASN	92	25 ASN	65 ASN	86,67
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	Dokumen	25 ASN	23 ASN	92	25 ASN	23 ASN	63,89
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	36 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Anggaran	Anggaran								
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	95%	94%	94%	-	-	95%	-	-
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45 Unit	Unit	36 psg	-	-	34 Unit	-	-
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	288 Paket	Paket	108 Paket	-	-	106 Paket	-	-
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Dokumen	3 Orang	-	-	2 Orang	-	-
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Orang	3 Kali	-	-	2 Kali	-	-
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Orang	3 ASN	-	-	3 ASN	-	-
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	95 %	89 %	90 %	-	-	90 %	-	-
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	Paket	16 Unit	-	-	20 Unit	-	-
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Paket	100
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	Paket	5 Paket	-	-	10 Paket	-	-
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	81 Liter	92 liter	-	-	104 liter	-	-
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	35 meter² 16.666 lembar	100 meter² 20.000 lembar	100 meter² 20.000 lembar	100	110 meter² 21.600 lembar	4 Paket	-
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	768 exemplar	768 exemplar	768 exemplar	100	768 exemplar	-	-
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	Dus	50 Dus	180 Dus	360	50 Dus	-	-
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Orang	242 Orang 250 Dus	112 Orang	46,28	271 Orang 250 Dus	271 Orang	100
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan	36 Dokumen	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD	95 %	90 %	90 %	-	-	92 %	-	-
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Unit	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Unit	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Unit	18 Buah	-	-	20 Buah	-	-
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Unit	13 Unit	-	-	14 Unit	1 Unit	3,33
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	7 Unit	-	-	8 Unit	-	-
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasional perkantoran	98 %	96 %	96 %	-	-	97 %	97 %	-
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Unit/ Kali	20 Unit/Kali	-	-	25 Laporan	-	-
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2023) (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	93 %	91 %	91 %	-	-	92 %	-	-
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	33,33
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	-	225 meter²	0 meter²	-	1 Unit	-	0 Unit
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-

*Point 1 = Nilai 0-40 *Point 2 = Nilai 41-60 *Point3 = Nilai 61-80 *Point 4 = Nilai 81-100

Tabel 2.5 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) s/d Tahun 2023 Kabupaten Minahasa (T-C.29.)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Urusan Pemerintahan									
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal									
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6 %	6.139.449.056.111	25 %	201.147.433.804	287	2%	45.515.854.283 (31-07-2024)	363,24%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	3 Dokumen	Dokumen	25 %	Dokumen	0	1 Dokumen	-	-
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	-	-
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18 Dokumen	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	6 Dokumen	-	-
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	-	-
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	-	-
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	3 Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0	1 Daerah	-	-
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	3 Dokumen	Dokumen	9 Dok	Dokumen	0	1 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Investasi Kabupaten/Kota	Investasi Kabupaten/Kota								
2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	30 Badan Usaha	-	-	-	-	10 Badan Usaha	-	-
2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	30 Badan Usaha	-	-	-	-	10 Badan Usaha	-	-
2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Tercapainya Jumlah kemitraan usaha nasional	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	30 UMKM	-	-	-	-	10 UMKM	-	-
2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-
2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66 Investor	0	10 %	0	0	20 Investor		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	180 Pengunjung	Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	33,33	50 Pengunjung		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33	3 Dokumen		
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	613944Dokumen	Dokumen	1 Dokumen		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	240.000.000.000	6.139.449.056.111	70.000.000.000	201.147.433.804	2908,13	80.000.000.000	45.515.854.283 (31-07-2024)	92,68%
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9 Laporan	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	85 Izin/ Non Izin	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual		46 perizinan (12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual)"	1.195.000	99,58%
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	25 Investor	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	-
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	14 Hari Kerja	1000 pelaku usaha	2.647 pelaku usaha		10 Pelaku Usaha	1.195.000	
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	1.802 Investor 9 non UMK 1.793 UMK	-	2.647 Investor 5 non UMK 2.642 UMK	-	50 Pelaku Usaha	-	-
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	360 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	120 Kegiatan Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
		Lintas Daerah Kab/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha								
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	37 Laporan	353.831.173	10 %	10 %	-	10 Laporan		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	9 Laporan	3 Laporan	26 Kali	12 Kali	-	3 Laporan		
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	-	8 Kegiatan Usaha		
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	615 Pelaku Usaha	15 Kegiatan	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	-	205 Pelaku Usaha		
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	39 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	-	13 Kegiatan Usaha		
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	3 Dokumen	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	3 Laporan	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	1 Laporan	-	-
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	44 Dokumen	1 Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	A	BB	A	C		A	54,96%	1.450.782.379
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89	87	87		4 Nilai 87		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	40 Dokumen	97 %	100 %	100 %	-	13 Dokumen	4 Dokumen	
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	4 Dokumen	2 Dokumen	
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	-	
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	1 Laporan	
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradiministrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	54,68%	1.247.948.679
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 ASN	23 ASN	25 ASN	65 ASN	86,67	25 Orang/bulan	54,68%	1.247.948.679
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	36 Dokumen	23 ASN	25 ASN	23 ASN	63,89	12 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	-	-	-	-	-		
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36 Dokumen	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	-	-	-	-	95%		
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	-
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	-
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	-
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	-
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	95%	-	95%	-	-	95%		
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45 Unit	-	34 Unit	-	-	10 Unit	-	-
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	288 Paket	-	106 Paket	-	-	96 Paket	-	-
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	-	2 Orang	-	-	5 Orang	-	-
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	-	2 Kali	-	-	50 Orang	-	-
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	-	3 ASN	-	-	5 Orang	-	-
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	95 %	-	90 %	-	-	92%		
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	-	20 Unit	-	-	12 Paket	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	100	12 Paket	-	-
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	-	10 Paket	-	-	20 Paket	-	-
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	104 liter	-	-	1 Paket	-	-
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	100 meter² 20.000 lembar	110 meter² 21.600 lembar	4 Paket	-	12 Paket	-	-
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	768 exemplar	768 exemplar	-	-	1 Dokumen	-	-
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	180 Dus	50 Dus	-	-	12 Laporan	-	-
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	112 Orang	271 Orang 250 Dus	271 Orang	100	12 Laporan		
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	-	-	-		12 Dokumen	-	-
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	-	-	-		12 Dokumen	-	-
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD	95 %	-	92 %	-	-	93%	-	-
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	0 Unit	-	-
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	0 Unit	-	-
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	-	20 Buah	-	-	20 Unit	-	-
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	-	14 Unit	1 Unit	3,33	10 Unit	1 Unit	
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	8 Unit	-	-	1 Unit	-	-
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasional perkantoran	98 %	-	97 %	97 %	-	97%	71,73%	196.913.700
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100,00%	4.000.000
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	83,07%	101.113.700
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	-	25 Laporan	-	-	12 Laporan	-	-
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	61,69%	91.800.000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	93 %	-	92 %	-	-	92%	17,45%	5.920.000
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	33,33	2 Unit	17,45%	5.920.000
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	-	-	-	-	0 Unit	-	-
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	-	-	-	-	20 Unit	-	-
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	-	-	-	10 Unit	-	-
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	0 meter²	1 Unit	-	0 Unit	1 Unit	-	-
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

*Point 1 = Nilai 0-40 *Point 2 = Nilai 41-60 *Point3 = Nilai 61-80 *Point 4 = Nilai 81-100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah melaksanakan program dan kegiatan serta pengukurannya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai Renstra PD Tahun 2023 dalam upaya peningkatan realisasi nilai investasi dan jumlah investor yang menanamkan modalnya melalui kebijakan penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD. Target NI Tahun 2023 adalah 1 (satu) trilyun rupiah dengan capaian sebesar 1.457.156.011.532 rupiah, sedangkan jumlah investor sebanyak 2.647 dari target sebanyak 20 investor.

Beberapa indikator kinerja yang telah dicapai antara lain :

1. Jumlah penyusunan kebijakan penanaman modal Tahun 2023 sebanyak 2 dokumen, namun tidak ada satupun kebijakan yang terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran untuk hal tersebut.
2. Persentase peningkatan investasi naik sebesar 287% (Rp. 201.147.433.804,-) dari tahun sebelumnya yang hanya 273,73% (Rp. 91.309.000.000,-) dari target 11,11%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, merupakan indikator penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang ditujukan kepada pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian akan menjadi

tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan khususnya aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan. Hasil survey Tahun 2022 dengan realisasi mencapai nilai 89 dan Tahun 2023 mencapai nilai 87 yang mengalami penurunan namun masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu point *4 dengan nilai 81-100. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian IKM antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko/ Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), maka aplikasi OSS RBA digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Manfaat penggunaan OSS RBA antara lain:
   - Berbagai pengurusan perizinan berusaha dipermudah baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan tepat waktu;
   - Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
b. Pemanfataan aplikasi perizinan online dengan nama SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat digunakan oleh instansi pusat maupun daerah. SiCANTIK merupakan aplikasi berbasis web untuk perizinan berusaha maupun layanan lainnya yang tidak diakomodasi dalam OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

4. Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/ PMA), Tahun 2022 sebesar Rp. 6.139.449.056.111 menurun dibandingkan dengan nilai investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.457.156.011.532;
5. Nilai realisasi investasi di daerah dengan asumsi bahwa Ketika pelaku usaha mengajukan nomor induk berusaha (NIB), Tahun 2022 Rp. 91.309.000.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 201.147.433.804 meningkat pesat karena semakin banyak pelaku usaha berskala besar dan menengah yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan (3 bulan sekali) yang terdiri dari Laporan Konstruksi dan Laporan Produksi, serta pelaku usaha kecil wajib untuk melaporkan LKPM setiap semester (6 bulan sekali). Untuk Usaha Mikro, nilai investasi atau data proyek yang diinput dalam sistem OSS RBA diluar nilai tanah dan bangunan karena Usaha Mikro tidak wajib melaksanakan LKPM. Hal ini disebabkan karena DPMPTSP kabupaten Minahasa lebih giat melakukan sosialisasi/ bimtek serta pelaksanaan pengawasan langsung kepada pelaku usaha dan memfasilitasi tatacara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal.

   Periode pelaporan LKPM :

   a. Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester):
      - Semester I: Pelaporan tanggal 1-10 Juli;
      - Semester II: Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
   b. Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (Triwulan) :
      - Triwulan I: Pelaporan tanggal 1-10 April;
      - Triwulan II: Pelaporan tanggal 1-10 Juli;
      - Triwulan III: Pelaporan tanggal 1-10 Oktober;
      - Triwulan IV: Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

   Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang menjalankan bisnis di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha penanaman modal domestik baik perorangan maupun badan dengan mengandalkan modal dalam negeri. Kegiatan PMDN dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:

a. Non UMK adalah usaha yang dibangun dengan modal usaha di atas Rp 10 miliar, seperti usaha besar, menengah, badan usaha luar negeri, serta kantor perwakilan, dan
b. Usaha menengah dan kecil (UMK) adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp.50.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp.300.000.000,-

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dapat dilihat sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa (T-C.30.)

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	N/A	N/A	Point	*4	*4	*4	*4	*4	*4	-	*4	*4 (83)	Mutu pelayanan baik
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/ PMA)	N/A	N/A	Rp.	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532	-	150.000.000.000	175.000.000.000	-
3	Nilai Realisasi Investasi di daerah	N/A	N/A	Rp.	900.000.000.000	1.000.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	91.309.000.000	201.147.433.804	45.515.854.283	80.000.000.000	80.000.000.000	Realisasi TW II Tahun 2024
*Point 1 = Nilai 0-40					*Point 2 = Nilai 41-60				*Point3 = Nilai 61-80				*Point 4 = Nilai 81-100	

Dalam pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Minahasa mengacu kepada peraturan terbaru yakni peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga DPMPTSP Kabupaten Minahasa tidak memerlukan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel 2.7 Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2023

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	1 (satu)	4 (empat)
2	Perizinan Sektor Pertanian		
3	Perizinan Sektor Lingkungan		
4	Perizinan Sektor Perindutrian		
5	Perizinan Sektor Perdagangan		
6	Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
7	Perizinan Sektor Transportasi		
8	Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan		
9	Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan		
10	Perizinan Sektor Pariwisata		
11	Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi Elektronik Ketenagakerjaan		
12	Perizinan Sektor Ketenagakerjaan		
13	Persetujuan Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
14	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkumgan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkumgan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
15	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) SPPL		
16	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kab. Minahasa	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kab. Minahasa
17	Izin Praktek Dokter Umum	3 (tiga)	8 (delapan)
18	Izin Praktek Dokter Gigi	3 (tiga)	8 (delapan)
19	Izin Praktek Dokter Spesialis	3 (tiga)	8 (delapan)
20	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 (tiga)	8 (delapan)
21	Izin Praktek Dokter Intersip	3 (tiga)	8 (delapan)
22	Izin Praktek Psikologi Klinis	3 (tiga)	8 (delapan)
23	Izin Praktek Perawat	3 (tiga)	8 (delapan)

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
24	Izin Praktek Bidan	3 (tiga)	8 (delapan)
25	Izin Praktek Apoteker	3 (tiga)	8 (delapan)
26	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 (tiga)	8 (delapan)
27	Izin Kerja Tenaga Epidomologi Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
28	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	3 (tiga)	8 (delapan)
29	Izin Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	3 (tiga)	8 (delapan)
30	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
31	Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	3 (tiga)	8 (delapan)
32	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	3 (tiga)	8 (delapan)
33	Izin Kerja Tenaga Sanitarian Lingkungan	3 (tiga)	8 (delapan)
34	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
35	Izin Kerja Tenaga Mikrobiolog Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
36	Izin Kerja Tenaga Gisi	3 (tiga)	8 (delapan)
37	Izin Kerja Tenaga Fisioterapis	3 (tiga)	8 (delapan)
38	Izin Kerja Tenaga Okupasi	3 (tiga)	8 (delapan)
39	Izin Kerja Terapis Wicara	3 (tiga)	8 (delapan)
40	Izin Praktek Akupuntur	3 (tiga)	8 (delapan)
41	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
42	Izin Praktek Teknik Kardiovaskuler	3 (tiga)	8 (delapan)
43	Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah	3 (tiga)	8 (delapan)
44	Izin Kerja Refraksionis optisien / Optometris	3 (tiga)	8 (delapan)
45	Izin Praktek Tekhnisi Gigi dan Mulut	3 (tiga)	8 (delapan)

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
46	Izin Kerja Audiologis	3 (tiga)	8 (delapan)
47	Izin Kerja Radiografer	3 (tiga)	8 (delapan)
48	Izin Praktek Elektromedis	3 (tiga)	8 (delapan)
49	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3 (tiga)	8 (delapan)
50	Izin Praktek Fisikawan Medik	3 (tiga)	8 (delapan)
51	Izin Kerja Radioteraphis	3 (tiga)	8 (delapan)
52	Izin Praktek Ortotik Prostetik	3 (tiga)	8 (delapan)
53	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	3 (tiga)	8 (delapan)
54	Izin Trayek	3 (tiga)	6 (enam)
55	Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus	3 (tiga)	10 (sepuluh)
56	Fiskal Daerah	3 (tiga)	4 (empat)
57	Rekomendasi Pemasangan Papan Reklame	3 (tiga)	8 (delapan)
58	Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	3 (tiga)	10 (sepuluh)

Gambaran Umum Sistem OSS-RBA

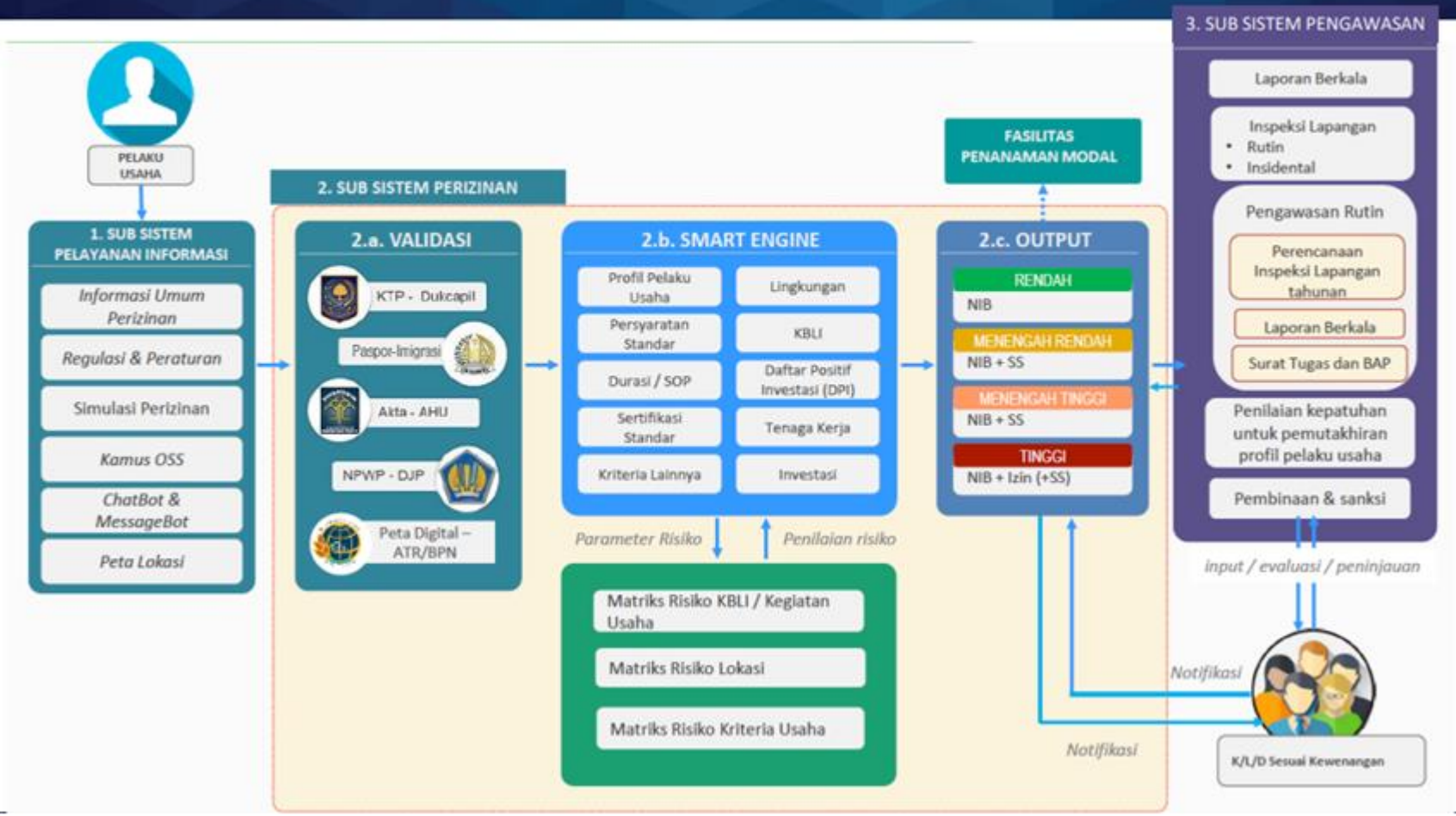

Alur Pembuatan Akun SIMBG
PENDAFTARAN AKUN SIMBG SEBAGAI PEMOHON
1 Masuk laman SIMBG
2 Klik "Daftar"
3 Pilih Daftar sebagai "pemohon PBG/SLF/ SBKBG/RTB"
4 Masukan email
5 Masukan kata sandi
6 Isi kode keamanan lalu "kirim"
7 Cek verifikasi email
*Tombol beranda tidak akan berfungsi selama data diri belum dilengkapi.
MASUK SEBAGAI PEMOHON
1 Masuk laman SIMBG
2 Klik "Masuk"
3 Masuk dengan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan
4 Isi kode keamanan, lalu "Masuk"
MELENGKAPI DATA DIRI PEMILIK
1 Melengkapi formulir data diri
2 Klik "Simpan"

MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.
1.
OSS
2.
3.
NIB
API

ALUR PERMOHONAN PBG DAN SLF MELALUI SIMBG

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHAPAN PROSES PERIZINAN BERUSAHA PADA https://oss.go.id/

REGISTRASI

- Pendaftaran hak akses menggunakan NIK/e-KTP untuk WNI atau Passport untuk WNA, serta nomor pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan untuk badan usaha
- Pelaku usaha dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

PENDATAAN

- Pengisian detail data kegiatan usaha berdasarkan KBLI & Lokasi usaha
- Data kegiatan usaha meliputi: produk/ jasa, kapasitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal, jumlah tenaga kerja, rencana nilai investasi, lingkungan, bangunan gedung

PENERBITAN

-Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko terhadap kegiatan usaha
-NIB untuk risiko rendah
-NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi
-NIB dan Izin untuk risiko tinggi
-Sertifikat Standar Usaha dan/atau Produk dapat diajukan untuk risiko Menengah dan Tinggi jika diperlukan

PENGAWASAN

- Pengawasan meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha, atau persyaratan lain berdasarkan NSPK K/L dan kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
- Pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaran

LEGALITAS

-Legalitas badan usaha berdasarkan validasi data AHU online.
- Legalitas perseorangan termasuk UMK berdasarkan data NIK
- Pengisian KBLI, Lokasi Usaha dan kriteria lainnya penentu risiko
- Pengisian akses kepabeanan, API, BPJS dan WLKP

ANALISA RISIKO

-Sistem menganalisis tingkat risiko dari kegiatan usaha
-Mengacu kepada aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha

FASILITAS

- Pengajuan fasilitas berupa Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang dan Pembebasan Bea Masuk (Masterlist) diberikan kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Berkaitan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam meberikan pelayanan publik di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Minahasa menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik di bidang penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong perekonomian nasional. Namun pemerintah pusat melihat bahwa nilai investasi di Indonesia masih rendah diakibatkan oleh berbelitnya prosedur perizinan di berbagai sektor sehingga memandang perlu adanya pembenahan perundang-undangan untuk menghapus kerumitan pelayanan perizinan yang pada akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) kini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menindaklanjuti dari Undang-Undang tersebut, di susunlah 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden dimana 2 peraturan pemerintah telah dimandatkan pada Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Kedua PP tersebut memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang peralihan perizinan berusaha di daerah, penyusunan perda/perkada tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk berdiri sendiri dan non tipelogi, penyusunan perda/perkada tentang rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang, penyusunan perkada pendelegasian kewenangan kepala daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta penetapan dan pelantikan

jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerapan aplikasi online single submission risk based assessment (OSS RBA). Penerapan sistem OSS RBA diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia dengan membagi perizinan sesuai dengan tingkat risiko dari pelaku usaha.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mentransformasikan tata lembaga pemerintahan dari struktural menjadi fungsional memerlukan antisipasi pada sisi perencanaan di bidang anggaran dan kepegawaian. Perhitungan cermat dari kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensinya perlu diiringi oleh kemampuan anggaran dinas.

Beberapa isu-isu penting lainnya yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu antara lain:

1. Kebijakan penanaman modal;
2. Kerjasama penanaman modal;
3. Pelayanan publik;
4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Realisasi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal.

Sebagai lembaga daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/ pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel. Pembangunan sistem transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penanaman modal namun harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana fisik, kelayakan fungsi bangunan maupun dukungan teknologi informatika dengan didukung oleh kualitas etika dan kemampuan SDM.

Identifikasi isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa secara umum adalah sebagaimana pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Gambaran Pelayanan OPD						
1 Kebijakan penanaman modal	➢ Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM	- Data promosi potensi investasi - Kualitas dan kapasitas SDM aparatur bidang penanaman modal dalam penyediaan infomasi dan penyusunan kebijakan - Sarana prasarana penunjang pelayanan publik DPMPTSP Kab. Minahasa - Kapasitas pembiayaan	- Terbitnya UU tentang cipta kerja tidak diikuti dengan turunannya termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA - Data potensi peluang investasi belum sepenuhnya disusun sesuai RDTR - Dukungan sektor terkait dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi	- Tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA - Belum adanya aturan yang disusun terkait pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi - Belum tersedia informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan berbasis unggulan lokal dan terbatasnya insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim PM - Promosi peluang PM daerah, belum didukung oleh ketersediaan anggaran dan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA)	- Menyusun perda/ perkada terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah untuk dijadikan referensi bagi DPMPTSP Kabupaten Minahasa - Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi - Menyusun RUPM, peta peluang potensi dan pemberian fasilitas/ insentif PM sesuai dengan RTRW dan RDTR - Implementasi MPP fisik maupun digital - Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2 Kerjasama penanaman modal	➢ Penyelenggaraan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal - Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di	- Kualitas dan kapasitas SDM aparatur bidang PM dalam pembinaan kemitraan - Sarana prasarana penunjang pelayanan publik DPMPTSP Kab. Minahasa - Kapasitas pembiayaan	- Dukungan sektor/ kelembagaan terkait - Koordinasi dengan pihak terkait	Belum terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional	- Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi - Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/ insentif PM - Mengikuti bimtek terkait promosi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Minahasa dengan mengikuti even dan forum pameran investasi - Melakukan sosialisasi di media online dan media lainnya untuk menghindari pihak ketiga/calo dalam pengurusan perizinan - Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa - Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD - Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		daerah				5S (senyum salam sapa sopan santun)
3 Pelayanan publik	➢ Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang	- Kualitas dan kapasitas SDM Aparatur minim - Sarana prasarana kerja dan fasilitas pelayanan - Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM	- Dukungan sektor terkait dalam pelayanan publik - Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD teknis - Belum terintegrasi Sistem Informasi pelayanan di tiap kementerian/ lembaga - Koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah teknis belum optimal terkait OSS RBA	- Kompetensi SDM Aparatur belum selaras dengan peta jabatan dan analisa jabatan, bukan hanya secara akademis namun secara etika melayani masyarakat - Adaptasi dengan manajemen ASN karena perubahan sistem kerja dan penyetaraan jabatan - Sarana dan prasarana yang ada belum cukup dalam menunjang pelayanan publik (mobil operasional, papan nama, plakat penunjuk arah ruang laktasi, ruang pengaduan, dll) - Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan PTSP antara BKPM RI dengan Kemendagri - Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online - Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan elektronik dan mobile (tidak terupdatenya sistem informasi)	- Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa - Mengikuti bimbingan teknis terkait kapasitas petugas layanan dalam memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD - Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi - Inovasi layanan memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti membuat pelayanan di desa, kelurahan hingga kecamatan melalui gerai perizinan

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - SOP dan SP DPMPTSP Kabupaten MInahasa sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan, non perizinan bidang PM				- Sosialisasi OSS RBA - Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi - Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)
4 Pengelolaan data dan informasi	➢ Pelayanan penyediaan data dan informasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - SOP dan SP DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagai	- Kapasitas SDM aparatur bidang penanaman modal dalam penyediaan layanan penanaman modal - Sarana prasarana kerja terutama infrastruktur pendukung - Kapasitas pembiayaaan	- Penyampaian LKPM dari investor - Penyampaian data/informasi Penanaman modal - Belum efektifnya peran koordinasi antar PD tim teknis - Anggaran diklat	- Integrasi database berbasis NIK dari dukcapil sebagai bahan pendaftaran permohonan perizinan masih terkendala - Sarana dan prasarana yang ada belum cukup dalam menunjang pelayanan publik terutama teknologi informasi (termasuk jaringan internet)	- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD - Menyediakan media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accessible sesuai dengan perkembangan teknologi - Mengupdating system semi online ke online full/ penerapan teknologi informasi - Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa melalui bimtek terkait pelayanan publik - Melakukan sosialisasi di media online dan media lainnya untuk menghindari pihak ketiga/calo dalam pengurusan perizinan - Inovasi layanan publik secara mobile untuk

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal				mendukung peningkatan mutu layanan perizinan dan non perizinan di bidang PM - Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi - Pemantauan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM - Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi
5. Realisasi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal	➢ Jumlah Investor berskala provinsi/ nasional (PMDN/PMA) ➢ Penyerapan tenaga kerja lokal dari PMDN/PMA ➢ Jumlah dan realisasi investasi sektor primer	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	- Daya saing sektor/ komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan PM - Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah	- Kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah/ besar dan berkembang menjadi masih rendah - Daya saing sektor/ komoditas unggulan daerah dari aspek infrastruktur pendukung penanaman modal sektor/ komoditas unggulan daerah (termasuk tata ruangnya) - Kepedulian pelaku	- Terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi PM - Masih terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah - Masih terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal (PMA/PMDN) - Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer - Tingkat kesadaran pelaku usaha	- Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun data potensi peluang investasi dan data eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur - Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/ insentif PM - optimalnya pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi - Pemantauan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
				usaha minim untuk melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM - Kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah	minim dalam melaporkan hasil kegiatannya di LKPM	- Sosialisasi OSS RBA - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD - Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional

Sebagai lembaga daerah DPMPTSP Kabupaten Minahasa diharapkan menjadi ujung tombak yang dapat mengakomodasi keinginan pelaku usaha/ investor memperoleh pelayanan lebih mudah, murah cepat dan tepat secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (SMART) yang mendukung visi “Minahasa yang mandiri dan sejahtera” dan misi “Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus” dan “Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, demokrasi, supremasi dan kepastian hukum”.

Sinergitas kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dari tingkat pusat, provinsi terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) maupun standar pelayanan minimal (SPM) merupakan upaya dalam mengawal pembanguan di Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPD). Secara garis besar pencapaian visi nasional fokus mendatangkan investasi ke Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas habis hal-hal yang menghambat investasi baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit dan yang ada punglinya serta reformasi birokrasi yang sederhana, lincah dengan cara memangkas birokrasi yang tidak efisien yang pada akhirnya kunci dalam menarik investasi sehingga mempercepat proses perizinan untuk pelayanan prima berkualitas.

Tabel 2.9 Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan

Kementerian Investasi/ BKPM		DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara	DPMPTSP Kabupaten Minahasa
Visi	Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagi pintu gerbang Indonesia Asia Pasifik	Minahasa yang mandiri dan sejahtera
Misi	2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri	2. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus
	8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpecaya		3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, demokrasi, supremasi dan kepastian hukum
Tujuan	1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	1. Mewujudkan Minahasa yang berdaya saing, kompetitif berbasis budaya mapalus
	2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima		2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran	1. Meningkatkan realisasi penanaman modal	1. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan daya saing berdasarkan budaya mapalus
	2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanaman modal		2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani		
Strategi		1. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi	1. Penguatan kapasitas sistem OSS dan LKPM
			2. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Beberapa faktor tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa di masa yang akan datang diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik serta terhadap peran investasi dalam mengurangi pengangguran dan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Terealisasinya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat;
4. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
5. Iklim investasi yang belum kondusif memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru di daerah terutama menyangkut perbaikan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal di daerah, perbaikan pelayanan, penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi, tata cara pengenaan sanksi administratif perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan bidang penanaman modal hingga penyediaan infrastruktur;
6. Penyusunan kajian akademik dan peraturan daerah tentang penyusunan RUPM, pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
7. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video serta pembuatan booklet dan leaflet;
8. Kesadaran pelaku usaha/ investor terkait kewajiban pelaporan penanaman modal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;

9. Koordinasi dan sinkronisasi DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis belum optimal dan masih belum sadar terkait kewenangan dan kewajiban pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah;
10. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inspeksi pengawasan perizinan berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha;
11. Penyederhanaan persyaratan PBG
12. Membentukan Asosiasi Arsitek Indonesia (AAI)
13. Integrasi sistem data antar perangkat daerah dan BPS;
14. Adanya alih media arsip fisik menjadi arsip digital;
15. Penyesuaian terhadap SOP dan SP serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
16. Pengembangan sistem pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan agar memudahkan pelayanan terhadap masyarakat;
17. Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan beberapa peluang yang ada dalam melaksanakan tugas peningkatan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa adalah:

1. Potensi lahan investasi melimpah belum dimanfaatkan sebagai modal daerah untuk menarik minat investor;
2. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang untuk meningkatkan pelayanan publik secara professional;
3. Tersedianya kebijakan/ dasar hukum dari pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepala daerah untuk mengembangkan akses percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan;
4. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informas untuk memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasikan, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan penanaman modal dan pengenalan potensi investasi;

5. Kerjasama dan koordinasi antar daerah, instansi pemerintah, dunia usaha maupun dengan stakeholder terkait untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
6. Adanya anggaran sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan agar tepat waktu;
7. Dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja yang berperan akltif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

2.3.4. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang khususnya bidang teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal;
2. Ketersediaan ruang arsip;
3. Terselenggaranya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kapabilitas DPMPTSP Kabupaten Minahasa terkait layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/ investor melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan latihan (diklat) dari segi kemampuan akademik maupun etika;
5. Menyusun ketentuan dan kajian peraturan perundang-undangan DPMPTSP Kabupaten Minahasa secara utuh, utamanya untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan perizinan dan investasi daerah yang mengikuti dinamika dunia usaha sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara online dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi dan data dalam penerapan satu pintu untuk upaya pemberian informasi, penanganan

konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan e-government urusan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal;

7. Meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kemudahan berbisnis dengan penyediaan data potensi sektor investasi yang akurat, pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, promosi peluang dan potensi investasi dengan mengikuti even dan forum pameran investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal;
8. Koordinasi, pembinaan, pengawasan, harmonisasi dan sosialisasi kepada investor/ pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan bidang penanaman modal baik terkait pelaksanaan usaha maupun dalam pelaporan (LKPM) yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Minahasa;
9. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu kota atau negara dengan menampilkan produk-produk khas Kabupaten Minahasa;
10. Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR serta zonasi dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan lingkungan;
11. Membuka kesempatan kerja, melalui penguatan peran tradeable sectors yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional;
12. Pelayanan publik perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (SMART) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
13. Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM;
14. Penguatan Kualitas SDM Kinerja Pelayanan Publik;
15. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik secara profesional.

Arah Kebijakan:

- Pengembangan sistem teknologi informasi;
- Penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur berbasis teknologi informasi secara online;

- Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan;
- Mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja dan hasil kegiatannya;
- Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi;
- Melaksanakan pengembangan kualitas SDM Aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi serta kursus teknis bidang pelayanan publik;
- Implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
- Penataan regulasi daerah tentang kepastian hukum pelayanan publik bidang perizinan dan investasi .

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk:

1) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang dilakukan melalui proses;
2) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yang dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolok ukur dan dana yang dibutuhkan;
3) penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD agar tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa tercapai sesuai dengan terget kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, sekaligus acuan dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024 dimana RKPD merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana opersional yang

berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah, maka penyusunan renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan walaupun terdapat beberapa perubahan penambahan atau pengurangan berdasarkan dokumen rancangan awal renja.

Adapun tahapan-tahapan review yang dilakukan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya yang telah terakomodir di SIPD. Hal ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Adanya perubahan peraturan perizinan bidang penanaman modal di tingkat nasional;
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD;
4. Membandingkan dan merumuskan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja DPMPTSP;
5. Menuangkan data dalam bentuk tabel matriks sehingga mempermudah dalam mengolah dan menyajikan data.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.4.1. Perbandingan antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025 dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa pada DPMPTSP Kabupaten Minahasa

yang akan dicapai Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:
    - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - 1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
        - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
        - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - 1.5.1 Pengadaan Mebel
        - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
    - 2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal:

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal:

4.1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

4.1.1 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Proses tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun hal tersebut dapat diwujudkan melalui :

1. Penggunaan dana APBD dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu adalah untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa;
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
3. Penyesuaian pagu pada rancangan awal dan indikatif dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan prioritas anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh pada pelayanan dasar masyarakat seperti MDGs (Millenium Developmnet Goals), maupun pelaksanaan-pelaksanaan program prioritas untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang;
4. Membuat sebuah regulasi yang meninjau kembali percepatan kemudahan berusaha yang bersinergi antara pemerintahan pusat, provinsi dan kab/kota;
5. Melakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang bersinergi dengan kab/kota maupun provinsi.

Penyesuaian RKPD dengan analisis kebutuhan program dan kegiatan berikut besaran pendanaannya dapat terlihat pada tabel diuraikan sebagaimana tabel 2.10

Tabel 2.10 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Minahasa (T-C.31.)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Urusan Pemerintahan					Urusan Pemerintahan					
	Bidang Urusan Penanaman Modal					Bidang Urusan Penanaman Modal					2.18
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	850.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Min	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	0	2.18.02
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Minahasa	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	600.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 %	0	2.18.02.2.01
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Min	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	2 18 02 2.01 01
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan	300.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	6 Dokumen	0	2 18 02 2.01 03
						Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Min	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		2 18 02 2.01 04
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah laporan peta potensi investasi	6 Dokumen	250.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Min	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02 01
2.18.0	Penyediaan Peta Potensi	Kab.	Jumlah Peta Potensi Investasi	5 Dokumen	50.000.000	Pemutakhiran data	Kab. Min	Jumlah daerah yang telah	1 Daerah	0	2 18 02

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.2.02 .02	dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Minahasa	dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi			2.02 03
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Min	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02 04
						Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Kab. Min	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	0	2 18 02 3.03
						Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Kab. Min	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	10 Badan Usaha	0	2 18 02 3.03.01
						Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	0	2 18 02 3.04
						Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	10 Badan Usaha	0	2 18 02 3.04.01
						Kemitraan Usaha Nasional	Kab. Min	Tercapainya Jumlah kemityraan usaha nasional	100 %	0	2 18 02 3.05
						Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Kab. Min	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	10 UMKM	0	2 18 02 3.05.01
						Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Kab. Min	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	0	2 18 02 3.06
						Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka	Kab. Min	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka	1 Laporan	0	2 18 02 3.06.01

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
						Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.		Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan			
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Tersebar	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20 Investor	250.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Min & tersebar	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 Investor	97.000.000	2.18.03
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersebar	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	50 Pengunjung	250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	60 Pengunjung	97.000.000	2 18 03 2.01
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	2 18 03 2.01 02
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	97.000.000	2 18 03 2.01 03
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	497.500.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Min	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	1.200.000	2.18.04
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Minahasa	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	497.500.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	1.200.000	2 18 04 2.01
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Minahasa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.000	107.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Min	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	10 Investor	1.200.000	2 18 04 2.01 05
			Tersedianya dasar-dasar peraturan terkait teknis perizinan (dokumen)	5 Dokumen	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Orang/Pelaku Usaha	0	2 18 04 2.01 06
		DPMPTSP	Tersedianya layanan informasi perizinan dan non perizinan	2 Kegiatan	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Kab. Min Layanan konsultasi	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	50 Orang Pelaku Usaha	0	2 18 04 2.01 07

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
						berusaha berbasis risiko	perizinan berusaha berbasis risiko	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120	90.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Min & tersebar	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha			2 18 04 2.01 08
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Minahasa	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	100.000.000						
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	4 Kegiatan	200.000.000						
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10 Laporan	448.700.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Min	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	12 Laporan	399.392.600	2.18.05
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 Laporan	448.700.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 Lap	399.392.600	2 18 05 2.01
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan	82.425.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Min	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	82.424.750	2 18 05 2.01 04
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	25	214.920.545	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Min	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	205 Pelaku Usaha	165.613.500	2 18 05 2.01 05

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
								Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
		Kab. Minahasa	Terselesaikannya permasalahan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	4 Kegiatan	0	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Min	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	151.354.350	2 18 05 2.01 06
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	24 Kegiatan	151.354.455						
		Kab. Minahasa	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha	6 Dokumen	0						
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	55.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Min	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	0	2 18 06
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	1 Paket	55.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Min	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	2 18 06 2.01
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	55.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	0	2 18 06 2.01 02
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	1. Nilai SAKIP	A	11.426.963.915	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	1. Nilai SAKIP	A	2.624.708.277	2.18.01
		DPMPTSP	2.Nilai Indeks Kepuasan	81			DPMPTSP	2.Nilai Indeks Kepuasan	81		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Masyarakat					Masyarakat			
2.18.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencaaan yang ditetapkan	4 Dokumen	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	13 Dokumen	0	2 18 01 2.01
		DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	4 Dokumen							
		DPMPTSP	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	5 Dokumen							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	2 18 01 2.01.01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.01.02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.01.03
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.01.04
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.01.05
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0	2 18 01 2.01.06
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	2 18 01 2.01.07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.251.643.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.282.388.337	2 18 01 2.02

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.251.643.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.282.388.337	2 18 01 2.02.01
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.02
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.03
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.02.05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	2 18 01 2.02.06
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0	2 18 01 2.02.07
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.08
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	0	2 18 01 2.03
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.03.01
						Pengamanan Barang	DPMPTSP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	2 18 01

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
						Milik Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2.03.02
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.03
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.04
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.05
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.06
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.03.07
2.18.01.2.05.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	270.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Min & tersebar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	0	2 18 01 2.05
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMPTSP	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Min	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0	2 18 01 2.05.01
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Min	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	0	2 18 01 2.05.02
2.18.01.2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0	2 18 01 2.05.03
2.18.01.2.05.10	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.600.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	2 18 01 2.05.04
2.18.01.2.05.11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Min	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0	2 18 01 2.05.05
		DPMPTSP	Sertifikasi ISO Pelayanan publik	1 Dokumen	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Min & tersebar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	2 18 01 2.05.09

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersebar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	2 18 01 2.05.10
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	2 18 01 2.05.11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	92 %	374.500.915	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	92 %	33.863.500	2 18 01 2.06
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.000.915	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	2 18 01 2.06.01
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.171.500	2 18 01 2.06.02
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	0	2 18 01 2.06.03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	2 18 01 2.06.04
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0	2 18 01 2.06.05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	2 18 01 2.06.06
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	2 18 01 2.06.08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.692.000	2 18 01 2.06.09
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.11

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	SKPD		Elektronik pada SKPD			SKPD		Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	93 %	8.198.020.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	93 %	14.799.000	2 18 01 2.07
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.01
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.02
	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	2.035.020.000	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	2 18 01 2.07.05
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	14.799.000	2 18 01 2.07.06
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.09
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 %	245.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 %	274.526.440	2 18 01 2.08
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	2 18 01 2.08.01
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.726.440	2 18 01 2.08.02
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	2 18 01 2.08.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	67.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	148.800.000	2 18 01 2.08.04

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	92 %	82.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	92 %	33.930.000	2 18 01 2.09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	33.930.000	2 18 01 2.09.01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	2 18 01 2.09.02
	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	2 18 01 2.09.05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0	2 18 01 2.09.06
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.09
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.11

2.4.3 Temuan yang diperoleh dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja-PD dan RKPD sistematika dan substansi sudah mengacu pada peraturan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun belum sempurna. Pada penyusunan Renja-PD menampung usulan program dan kegiatan dari PD dan juga usulan program dan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom-up) atau stakeholder melalui mekanisme musrenbang dan forum PD, dari musrenbang dan forum PD inilah usulan program dan kegiatan di rekapitulasi dalam Renja-PD, kemudian dari Renja-PD usulan program dan kegiatan di adopsi sehingga tersusun Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD besaran pagu indikatif tahun 2024 mencapai 13,5 M, akan tetapi hasil analisis kebutuhan disesuaikan menjadi 3,1 M. Penyesuaian ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Minahasa dan prioritas anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh pada pelayanan dasar masyarakat seperti MDGs (Millenium Developmnet Goals), maupun pelaksanaan-pelaksanaan program prioritas untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Penyesuaian RKPD dengan analisis kebutuhan program dan kegiatan berikut besaran pendanaannya terdiri dari 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp11.426.963.915 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 2.624.708.277 sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)

   Perbedaan ini dikarenakan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan MPP ditangguhkan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp 850.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 0,-
3. Program Promosi Penanaman Modal

   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp 250.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 97.000.000 sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)

   Kegiatan yang dilaksanakan di program ini adalah hanya mengikuti kegiatan pameran investasi di 1 lokasi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp 497.500.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 1.200.000 sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp 448.700.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 399.392.600 sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Kegiatan yang dilaksanakan program ini adalah menyelenggarakan bimtek

tentang perizinan berusaha melalui OSS RBA dan cara pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah dan besar, yang disesuaikan dengan Juknis DAK non Fisik Fasilitasi PM (FPM) 2024

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp 55.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 0,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyusun renja PD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan, karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.

Hasil dari kajian musrembang yang yang telah dilaksanakan baik di tingkat Kelurahan/Desa maupun di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Minahasa, tidak ada usulan dari pemangku kepentingan baik dari masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Minahasa yang harus ditampung berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk Tahun 2025. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan tidak adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan peranan sosialisasi dan fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi, namun menjadi inisiatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan stategi promosi dan informasi yang merupakan media penting untuk menawarkan potensi investasi daerah sehingga masyarakat

paham terhadap juknis mekanisme perizinan yang selanjutnya tentu akan meningkatkan minat investasi.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa setiap tahunnya tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Tabel 2.11 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Minahasa (T-C.32.)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra dan renja kelembagaan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Telaahan terhadap kebijakan nasional RPJMN Tahun 2024-2029 hingga saat ini belum tersusun seiring proses pemilihan Presiden, sehingga dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal dengan nawacita kedua. Strategi dalam pelaksanaan misi nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional.

Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia dan RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi awal terwujudnya Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" terdapat 8 (delapan) strategi prioritas nasional yang harus diperhatikan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan:
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam hal ini adalah keselarasan antara renstra dan renja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Kementerian Investasi/ BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”; sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) keterkaitannya dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adanya suatu tujuan, sasaran dan strategi yang sama untuk mewujudkan investasi yang kondusif dan berdaya saing, dalam pelaksanaannya perlu didorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan iklim investasi, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan peningkatan sistem informasi penanaman modal, kemitraan UMKM dan usaha besar, kemudahan mengakses data.

Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mengatur tentang peningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Visi Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”. RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2045 ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang bertujuan mencapai Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada 8 agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan, siap bertransformasi menjadi daerah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

5 (lima) aspek isu strategis dalam penyusunan RPJPD yaitu:

1. Standar Sosial Budaya, Iptek dan Kesejahteraan Sosial;
2. Ekonomi;
3. Pembangunan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan; dan
5. Pengembangan Infrastruktur yang mendukung Geoposisi dan Geostrategis.

Selain itu, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2045 menargetkan pencapaian pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, serta penguatan infrastruktur yang mendukung posisi geopolitik dan geostrategis Sulawesi Utara, agar tercipta pemerataan pembangunan antara wilayah daratan, kepulauan, dan perbatasan. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Arah pembangunan daerah Kabupaten Minahasa periode Tahun 2024-2026 adalah Minahasa yang mandiri dan sejahtera, dengan misi yang ditempuh agar mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou;
2. *Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus*;

3. *Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum*;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur.

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
2. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025;
3. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;
4. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
5. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023.

Terkait dengan hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada regulasi pemerintah pusat dan provinsi, perlu kerja keras untuk mewujudkannya termasuk kendala internal maupun eksternal yang memerlukan kesigapan dan kecekatan dalam meminimalisir dampak dari kendala-kendala tersebut dengan menyiapkan solusinya yang tertuang dalam program dan kegiatan-kegiatan serta memperhatikan regulasi pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam mendukung program-program kebijakan utama tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
2. Program pengembangan iklim penanaman modal;
3. Program promosi penanaman modal;
4. Program pelayanan penanaman modal;
5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi serta dapat menggambarkan mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu :

a. “Meningkatkan investasi di Kabupaten” dan
b. “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta menyesuaikan dengan sasaran pada renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Peningkatan penanaman modal;
2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah;
3. Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional.

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025

VISI : Minahasa yang mandiri dan sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya mapalus			
MISI 3 : Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatkan Investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	0,93 %
	1. Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	75.000.000.000
	2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	A
	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (82)

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode Tahun 2024-2026, rumusan penetapan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Minahasa, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara lebih lengkap disajikan pada table 3.2

Tabel 3.2 Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Tahun 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
	Urusan Pemerintahan	
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal	
Tujuan	Meningkatkan Investasi di Kabupaten	
Indikator	Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	
Sasaran	Peningkatan Penanaman Modal	
Indikator	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
2.18.02.2.01	Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
2 18 02 2.01 01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan umkm di daerah
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko
2 18 02 2.02	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Tersedianya peta potensi investasi kabupaten/kota
2 18 02 2.02 01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem pir (potensi investasi regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi
2 18 02 2.02 04	Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota
2 18 02 3.03	Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	Tercapainya fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam yang dilaksanakan
2 18 02 3.04	Fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota	Tercapainya fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota
2 18 02 3.05	Kemitraan usaha nasional	Tercapainya jumlah kemitraan usaha nasional
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM milik pengusaha OAP dan/atau masyarakat hukum adat dengan perusahaan PMA/PMDN yang berskala besar	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM milik pengusaha OAP dan/atau masyarakat hukum adat dengan perusahaan pma/pmdn yang berskala besar
2 18 02 3.06	Koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota
2 18 02 3.06.01	Koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan
2.18.03	Program promosi penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa
2 18 05 2.01	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
2 18 05 2.01 05	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
		berusaha berbasis risiko
2 18 05 2.01 06	Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha
2 18 06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
2 18 06 2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sinkron
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
Sasaran	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	
Indikator	Nilai realisasi investasi di daerah	
2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
2 18 04 2.01	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penentapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten
2 18 04 2.01 06	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha
Tujuan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	
Indikator	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	
Sasaran	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
2 18 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencaaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan
2 18 01 2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 18 01 2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
2 18 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang teradiministrasi
2 18 01 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2 18 01 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD
2 18 01 2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
2 18 01 2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi
2 18 01 2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD
2 18 01 2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
	barang milik daerah pada SKPD	laporan barang milik daerah pada SKPD
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD
2 18 01 2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian
2 18 01 2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
2 18 01 2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaaan sistem informasi kepegawaian
2 18 01 2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 18 01 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2 18 01 2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terfasilitasi
2 18 01 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
2 18 01 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2 18 01 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
2 18 01 2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
2 18 01 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2 18 01 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
2 18 01 2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
2 18 01 2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD
2 18 01 2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
2 18 01 2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
2 18 01 2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)
1	*2*	*3*
2 18 01 2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
2 18 01 2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
2 18 01 2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
2 18 01 2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
2 18 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tingkat operasional perkantoran
2 18 01 2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
2 18 01 2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
2 18 01 2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2 18 01 2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
2 18 01 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai RKPBMD
2 18 01 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi dalam mencapai sasaran kebijaksanaan secara keseluruhan dan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, dilakukan perumusan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi melaui penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran renja tersebut yang tertuang dalam RKPD yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Minahasa.

Tabel 4.1 Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program
VISI : Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera									
Misi 2 :Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus									
Mewujudkan Minahasa yang berdaya saing, kompetitif berbasis budaya Mapalus	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Daya saing Berdasarkan Budaya Mapalus	Angka kemiskinan	Meningkatkan Investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan investasi di daerah	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM
			Indeks Gini						

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program
			Tingkat pengangguran						
								Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
								Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kab. Minahasa
								Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
						Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
Misi 3 : Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum									
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP
			Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rumusan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Minahasa dijabarkan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota:

   Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan masing-masing target yaitu A dan 82.

   Pelaksanaannya diimplementasikan melalui 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan outputnya, sebagai berikut :

   1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

      1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, output 4 dokumen

      1.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, output 1 dokumen

      1.1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, output 1 dokumen

      1.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, output 1 dokumen

      1.1.5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD, output 1 dokumen

      1.1.6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, output 3 laporan

      1.1.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah, output 2 laporan

   1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah

      1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output 25 orang/bulan

   1.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah

      1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, output 96 paket

   1.4 Administrasi umum perangkat daerah

      1.4.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, output 12 paket

      1.4.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, output 12 paket

1.4.3 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, output 12 laporan

1.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1.5.1 Pengadaan mebel, output 20 unit

1.5.2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, output 24 unit

1.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat, output 12 laporan

1.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, output 12 laporan

1.6.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, output 12 laporan

1.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, output 2 unit

2. Program pengembangan iklim penanaman modal:

Indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal adalah persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal sebesar 2%. Program yang akan dilaksanakan hanya 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu:

2.1 Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota

2.2.1 Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) daerah kabupaten/kota, output 1 dokumen Perda

3. Program promosi penanaman modal:

Indikator kinerja program promosi penanaman modal adalah jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target kinerjanya 22 investor baik PMDN/ PMA. Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan investor dalam satu tahun.

3.1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota

3.1.1 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota, output 3 dokumen

3.1.2 Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota, output 1 dokumen

4. Program pelayanan penanaman modal:

Indikator kinerja program pelayanan penanaman modal adalah Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan dengan target kinerjanya Rp. 80.000.000.000,-.

4.1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

4.1.1 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, output 50 kegiatan usaha

5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal:

Indikator kinerja program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa dengan target kinerjanya 12 laporan bagi pelaku usaha PMDN/ PMA yang berinvestasi. Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian dan ketaatan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya di Kabupaten Minahasa. Program terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yaitu:

5.1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

5.1.1 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, output 8 kegiatan usaha

5.1.2 Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, output 205 pelaku usaha

5.1.3 Pengawasan penanaman modal, output 13 kegiatan usaha

6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:

Indikator kinerja program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi dengan target kinerjanya 1 dokumen.

6.1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota

6.1.1 Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, output 12 dokumen

4.2.1. Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder*. Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan pada RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.676.506.900,- (termasuk kegiatan yang dibiayai dari DAK NF PM sebesar Rp. 388.842.650,-) yang terdiri dari Rp. 3.512.546.900,- untuk belanja operasi didalamnya Rp. 2.372.394.00,- untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Rp. 163.960.000,- untuk belanja modal. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagaimana tabel 4.2:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33.)

DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				3.676.506.900				4.988.853.915
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				3.676.506.900				4.988.853.915
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Minahasa	2 %	138.050.200	DAU		2 %	832.500.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	12.500.000
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Minahasa	6 Dokumen	0	DAU		6 Dokumen	5.000.000
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	2.500.000
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	138.050.200	DAU		1 Dokumen	750.000.000
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	138.050.200	DAU		1 Dokumen	50.000.000
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Minahasa	1 Daerah	0	DAU		1 Daerah	200.000.000
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	500.000.000
2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Kab. Minahasa	100 %	0	DAU		100 %	15.000.000
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Kab. Minahasa	10 Badan Usaha	0	DAU		10 Badan Usaha	15.000.000
2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	100 %	0	DAU		100 %	15.000.000
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	10 Badan Usaha	0	DAU		10 Badan Usaha	15.000.000
2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Tercapainya Jumlah kemityraan usaha nasional	Kab. Minahasa	100 %	0	DAU		100 %	15.000.000
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Kab. Minahasa	10 UMKM	0	DAU		10 UMKM	15.000.000
2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Kegiatan	0	DAU		1 Kegiatan	25.000.000
2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di	Kab. Minahasa	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan							
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Kab. Min & tersebar	22 Investor	153.000.000	DAU		24 Investor	250.000.000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Min & tersebar	60 Pengunjung	153.000.000	DAU		70 Pengunjung	250.000.000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Min & tersebar	3 Dokumen	128.000.000	DAU		3 Dokumen	200.000.000
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Min & tersebar	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	Kab. Min	80.000.000.000	11.737.000	DAU		80.000.000.000	170.000.000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min	3 Laporan	11.737.000	DAU		3 Laporan	170.000.000
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	Kab. Min	10 Investor	0	DAU		10 Investor	30.000.000
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	1000 Orang/Pelaku Usaha	0	DAU		1000 / Pelaku Usaha	100.000.000
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	50 Orang Pelaku Usaha	0	DAU		50 Orang Pelaku Usaha	30.000.000
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kab. Min & tersebar	120 Kegiatan Usaha	11.737.000	DAU		120 Kegiatan Usaha	10.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	Kab. Minahasa	12 Laporan	388.842.650	DAK		15 Laporan	448.700.000
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan	Kab. Minahasa	3 Laporan	388.842.650	DAK		3 Laporan	448.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah							
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Minahasa	8 Kegiatan Usaha	83.000.000,	DAK		8 Kegiatan Usaha	83.000.000
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Minahasa	205 Pelaku Usaha	150.842.650	DAK		205 Pelaku Usaha	210.700.000
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Minahasa	13 Kegiatan Usaha	155.000.000	DAK		13 Kegiatan Usaha	155.000.000
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	Kab. Minahasa	1 Dokumen	6.411.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Laporan	6.411.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Minahasa	16 Dokumen	6.411.000	DAU		16 Dokumen	100.000.000
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	DPMPTSP	A	2.978.466.050	DAU		A	3.187.653.915
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP	82				83	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	DPMPTSP	13 Dokumen	3.000.000	DAU		14 Dokumen	5.000.000
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	4 Dokumen	0	DAU		5 Dokumen	2.000.000
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	3 Laporan	500.000	DAU		3 Laporan	500.000
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Laporan	500.000	DAU		2 Laporan	500.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradiministrasi	DPMPTSP	100%	2.372.394.000	DAU		100%	2.251.643.000
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 Org/ bulan	2.372.394.000	DAU		25 ASN	2.251.643.000
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	0
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	0
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	0
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	0
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	0
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	0	DAU		12 Laporan	0
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	12 Dokumen	8	DAU		12 Dokumen	0
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	DPMPTSP	95%		DAU		95%	3.000.000
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	1.000.000
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Laporan		DAU		1 Laporan	0
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	1 Laporan		DAU		1 Laporan	1.000.000
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	1 Laporan		DAU		1 Laporan	0
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	1 Laporan		DAU		1 Laporan	0
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	1.000.000
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	Kab. Min & tersebar	95%	26.250.000	DAU		95%	230.600.000
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Min	15 Unit	0	DAU		20 Unit	10.000.000
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Min	96 Paket	26.250.000	DAU		96 Paket	65.000.000
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	1.000.000
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	3.600.000
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Min	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	1.000.000
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Min & tersebar	5 Orang	0	DAU		5 Orang	45.000.000
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	50 Orang	0	DAU		50 Orang	50.000.000
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	5 Orang	0	DAU		5 Orang	55.000.000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum PD yang Terfasilitasi	DPMPTSP	94 %	80.071.900	DAU		95 %	265.020.915

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Paket	0	DAU		12 Paket	24.020.915
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Paket	22.100.000	DAU		12 Paket	50.000.000
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMPTSP	25 Paket	0	DAU		30 Paket	0
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	0	DAU		1 Paket	5.000.000
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	12 Paket	3.095.900	DAU		12 Paket	5.500.000
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	0
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	12 Laporan	0	DAU		12 Laporan	30.000.000
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	12 Laporan	54.876.000	DAU		12 Laporan	150.000.000
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	500.000
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	0
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	DPMPTSP	94 %	163.960.000	DAU		95 %	100.000.000
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DPMPTSP	Unit	0	DAU		1 Unit	0
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		2 Unit	0
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMPTSP	20 Unit	45.980.000	DAU		20 Unit	0
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	10 Unit	117.980.000	DAU		10 Unit	100.000.000
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		Unit	0
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	Unit	0	DAU		Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	Unit	0	DAU		Unit	0
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	98 %	290.600.150	DAU		98 %	240.200.000
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	4.000.000	DAU		12 Laporan	25.000.000
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	138.000.150	DAU		12 Laporan	138.000.000
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	0	DAU		12 Laporan	10.000.000
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	148.600.000	DAU		12 Laporan	67.200.000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	DPMPTSP	93 %	42.190.000	DAU		93 %	92.190.000
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	2 Unit	42.190.000	DAU		2 Unit	42.190.000
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	Unit	0	DAU		1 Unit	0
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPTSP	20 Unit	0	DAU		20 Unit	0
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	10 Unit	0	DAU		10 Unit	50.000.000
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		1 Unit	0
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		1 Unit	0
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		1 Unit	0

Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD adalah sebagaimana tabel berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp. 138.050.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 138.050.200,00	Rp. 605.000.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.000.000,00
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Rp. 138.050.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 138.050.200,00	Rp. 305.000.000,00
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.050.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 138.050.200,00	Rp. 200.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.000.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp. 153.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 153.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 153.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 153.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 128.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 128.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp. 11.737.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.737.000,00	Rp. 297.500.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 11.737.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.737.000,00	Rp. 297.500.000,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 107.500.000,00
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.737.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.737.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp. 388.842.650,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 388.842.650,00	Rp. 448.700.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 388.842.650,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 388.842.650,00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 83.000.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.842.650,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.842.650,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 155.000.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp. 6.411.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.411.000,00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 6.411.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.411.000,00
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.411.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.411.000,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 2.814.506.050,00	Rp. 163.960.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.978.466.050,00
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.000.000,00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.372.394.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.372.394.000,00	Rp. 2.251.643.000,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.372.394.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.372.394.000,00	Rp. 2.251.643.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 26.250.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 26.250.000,00	Rp. 267.944.000,00
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000,00
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.250.000,00	Rp. 72.250.000,00
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.750.000,00
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 460.000,00
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.000.000,00
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.808.000,00
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 46.176.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 80.071.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 80.071.900,00	Rp. 445.496.500,00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.999.500,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.100.000,00	Rp. 32.007.500,00
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.990.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.095.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.095.900,00	Rp. 94.999.500,00
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.876.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.876.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 163.960.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 163.960.000,00	Rp. 2.443.340.000,00
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 45.980.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.980.000,00	Rp. 2.204.180.000,00
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 117.980.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 117.980.000,00	Rp. 239.160.000,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 290.600.150,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 290.600.150,00	Rp. 398.200.150,00
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.000.150,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 138.000.150,00	Rp. 138.000.150,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 148.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 148.600.000,00	Rp. 235.200.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 42.190.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 42.190.000,00	Rp. 42.190.000,00
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.190.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.190.000,00	Rp. 42.190.000,00
Jumlah									**Rp. 3.512.546.900,00**	**Rp. 163.960.000,00**			**Rp. 3.676.506.900,00**	**Rp. 7.508.013.650,00**

Kab. Minahasa,.....
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
NIP. 196605061990031013

4.3 Penjelasan Ketidaksesuaian

Penjelasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya serta dasar hukum yang menjadi acuan telah berubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijabarkan dalam tabel rencana dibawah ini:

Tabel 4.3

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Urusan Pemerintahan			14.028.163.915		Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			13.828.163.650,00
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal			14.028.163.915	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			13.828.163.650,00
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**2 %**	**650.000.000**	**2.18.02**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**2 %**	**600.000.000,00**
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	600.000.000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	300.000.000,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	2 Kegiatan	300.000.000	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan	6 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Berusaha di Daerah					UMKM di daerah		
					2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan peta potensi investasi	6 Dokumen	50.000.000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6 Dokumen	300.000.000,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	50.000.000,00
					2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000,00
					2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	0,00
					2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	10 Badan Usaha	0,00
					2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	0,00
					2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	10 Badan Usaha	0,00
					2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Tercapainya Jumlah kemityraan usaha nasional	100 %	0,00
					2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat	10 UMKM	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
						dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar		
					2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	0,00
					2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0,00
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**22 Investor**	**250.000.000**	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**22 Investor**	**250.000.000,00**
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	60 Pengunjung	250.000.000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	60 Pengunjung	250.000.000,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan**	**80.000.000.000**	**497.500.000**	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan**	**80.000.000.000**	**497.500.000,00**
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	497.500.000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	497.500.000,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	2.000	107.500.000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan	10 Investor	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Fasilitas/Insentif Daerah	Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten		
		Tersedianya dasar-dasar peraturan terkait teknis perizinan (dokumen)	5 Dokumen	0	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Orang/Pelaku Usaha	107.500.000,00
		Tersedianya layanan informasi perizinan dan non perizinan	2 Kegiatan	0	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Orang Pelaku Usaha	100.000.000,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120	90.000.000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	120 Kegiatan Usaha	90.000.000,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8	100.000.000					
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4 Kegiatan	200.000.000					
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa**	**12 Laporan**	**448.700.000**	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa**	**12 Laporan**	**448.700.000,00**
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan	3 Laporan	448.700.000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan	3 Laporan	448.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan	82.425.000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	83.000.000,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	30	214.920.545	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	205 Pelaku Usaha	210.700.000,00
		Terselesaikannya permasalahan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	4 Kegiatan	0					
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan	151.354.455	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	155.000.000,00
		Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha	6 Dokumen	0					
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi**	**1 Dokumen**	**55.000.000**	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi**	**1 Dokumen**	**55.000.000,00**
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Paket	55.000.000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		yang Sinkron							
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	55.000.000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	55.000.000,00
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**1. Nilai SAKIP**	**A**	**11.926.963.915**	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**A 0**	**2.814.506.050,00**
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**82**				**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**4 Nilai (82)**	
2.18.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan yang ditetapkan	4 Dokumen	5.000.000	2.18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	13 Dokumen	3.000.000,00
		Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	4 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	5 Dokumen						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	DPA- SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				DPA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.251.643.000	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100 %	2.372.394.000,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.251.643.000	2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.372.394.000,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
					2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	0	2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Laporan	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		Triwulanan/Semesteran SKPD					Semesteran SKPD		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0,00
					2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	
					2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
					2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
					2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	
					2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
					2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
					2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
					2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
2.18.01.2.05.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	270.600.000	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	26.250.000,00
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	20.000.000	2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	65.000.000	2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	26.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2.18.01.2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00
2.18.01.2.05.10	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.600.000	2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0,00
2.18.01.2.05.11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0,00
		Sertifikasi ISO Pelayanan publik	1 Dokumen	0					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	80.000.000	2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.000.000	2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	94 %	384.520.915	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	94 %	80.071.900,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.020.915	2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.100.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	50.000.000	2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.095.900,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	0	2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan				undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.876.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	94 %	8.708.000.000	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	94 %	163.960.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	2.200.000.000	2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	45.980.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	158.000.000	2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	117.980.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.000.000	2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		Disediakan					Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	245.200.000	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	290.600.150
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000	2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.150
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000	2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	93 %	62.000.000	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMD	93 %	42.190.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.000.000	2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	42.190.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000	2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	0	2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2025		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi				Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 disusun dengan harapan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan optimal karena merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat mengatasi keluhan dan ketidakpuasan masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut dari program nasional di bidang reformasi birokrasi yang berkorelasi pada perbaikan ekonomi masyarakat serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1) Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Ranhir DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025, merupakan upaya dalam menunjang tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan;

3) Dokumen Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dan RKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator juga respon terhadap kebutuhan dan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025, dengan tujuan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang ada dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;
4) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025, kiranya dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermances) dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2025 Kabupaten Minahasa yang memuat program kegiatan pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus mendukung arahan prioritas pembangunan daerah agar mampu berkompetisi, berikut beberapa langkah demi pencapaian tujuan pembangunan:

1) Dokumen Renja wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing PD;
2) Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Tahun 2025 dilakukan secara konsisten, tertib, terpadu, sinergis dan berkesinambungan melalui kerjasama dan koordinasi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Minahasa dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan;
3) Perumusan kebijakan teknis; penyusunan perencanaan; pelaksanaan kegiatan; pembinaan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada dan dilaksanakan secara

konsisten, akuntabel, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab;

4) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa terjadi berdasarkan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

5.3 Rencana tindak lanjut

1) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 memproyeksikan belanja sebesar Rp. 3.676.506.900,00 (termasuk kegiatan yang dibiayai dari DAK NF PM sebesar Rp. 388.842.650,-) yang terdiri dari Rp. 3.512.546.900,- untuk belanja operasi didalamnya Rp. 2.372.394.00,- untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Rp. 163.960.000,- untuk belanja modal;
2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan;
4) Rencana kerja ini sebagai pedoman kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
5) Diharapkan pelaksanaan Renja Tahun 2025 Kabupaten Minahasa dapat mewujudkan tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih dan terpercaya.

Demikian beberapa hal penyampaian dalam Renja Tahun 2025 ini agar dapat dijadikan pedoman dan pengontrol atau acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Minahasa dan diharapkan dapat terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan untuk pembangunan daerah. Terima kasih.

Tondano, Oktober 2024
Kepala Dinas,

Mekry J. Sondey, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013